

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, hal ini dikarenakan Indonesia terletak diantara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Hindia-Australia (BNPB, 2019). Bencana didefinisikan oleh UNISDR sebagai suatu gangguan terhadap peran suatu komunitas atau masyarakat pada skala apapun karena *hazard* (bahaya) yang berinteraksi dengan kondisi paparan, kerentanan dan kapasitas, yang mengarah ke satu atau lebih hal berikut ini: kerugian dan dampak terhadap manusia, material, ekonomi, dan lingkungan (Chmutina, 2019).

Data WHO menunjukkan tingginya angka mortalitas, morbiditas dan kecacatan akibat keadaan darurat. Setiap tahunnya sekitar 190 juta orang terkena dampak dari keadaan darurat karena bencana alam maupun teknologi dengan lebih dari 77.000 kematian (Sendai, 2015). Menurut Data Informasi Bencana Indonesia terdapat 9.390 kejadian bencana sepanjang tahun 2019 dengan korban meninggal 911 orang, luka-luka 2.163 orang dan terdampak bencana sebanyak 5.371.345 orang (Data Informasi Bencana Indonesia, 2019). Mengingat tingginya angka kejadian bencana di Indonesia diperlukan penerapan respon tanggap darurat bencana. Tanggap darurat yang efektif berarti intervensi kesehatan yang menyelamatkan jiwa dilaksanakan untuk memastikan bahwa populasi yang terkena dampak memiliki akses tepat waktu ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini mengurangi dampak kesehatan dari keadaan darurat, memastikan keselamatan publik, memenuhi kebutuhan subsistensi masyarakat dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa (WHO, 2020).

Salah satu prioritas utama dalam mengurangi resiko bencana jika mengacu pada kerangka kerja *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* adalah dengan menerapkan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Pengurangan

Resiko Bencana (PRB) adalah meningkatkan pemahaman risiko bencana dalam semua dimensinya dengan tujuan memanfaatkan pengetahuan untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon tanggap darurat yang lebih baik (Sendai, 2015).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sendiri dapat diartikan sebagai usaha-usaha seperti penetapan kebijakan terkait pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan terkait manajemen bencana. (Ismunandar et al., 2019). Penanggulangan bencana di Indonesia saat ini sudah menerapkan sistem kluster yang mengadaptasi dari dari *The Cluster System* yang dikembangkan oleh UN *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) untuk mengatasi kesenjangan serta meningkatkan efektivitas respon kemanusiaan dengan membangun kemitraan (WHO, 2016). IASC menerapkan sistem koordinasi standar yang disebut pendekatan cluster untuk memastikan bahwa penanganan bencana dapat lebih sinergis. Pendekatan kluster memperjelas pembagian kerja di antara organisasi dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab mereka dalam 11 bidang di Indonesia kegiatan kemanusiaan (OCHA, 2014).

Di Indonesia sendiri kebijakan mengenai penanggulangan bencana mengacu pada Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait dengan tetap mengadaptasi sistem kluster. Penanggulangan bencana di Indonesia berada dibawah komando Kepala BNPB atau BPBD untuk melakukan tanggap darurat pada saat keadaan darurat bencana dengan bantuan SDM dan peralatan dari Instansi/lembaga dan masyarakat, hal ini dijelaskan dalam PP No. 21 tahun 2008 pasal 25 ayat (1). Instansi/lembaga dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial (Wahyudi, 2017).

Selama ini masih banyak kendala dalam penanggulangan bencana, terutama terkait integrasi dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat termasuk mahasiswa, karena kurangnya kesadaran akan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, hal ini berpengaruh terhadap

lambannya respon penanganan bencana di Indonesia. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang mendapat mandat menanggulangi bencana menjadi salah satu faktor yang menghambat penanggulangan bencana di Indonesia. (Sirait, 2018). Terdapat egoisme organisasi atau lembaga dalam penanggulangan bencana, masih ada keinginan untuk tampil di depan publik sebagai lembaga yang paling berjasa dalam evakuasi korban bencana. (Rusfiana, 2018).

Sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan, termasuk kolaborasi antar profesi. Hal ini perlu ditanamkan dari sejak dini melalui *Interprofessional Education* (IPE).

Interprofessional Education (IPE) merupakan dua atau lebih profesi belajar bersama, IPE mempromosikan kolaborasi dimana para peserta meninjau hubungan antara profesi mereka, memahami satu sama lain dan mengeksplorasi cara-cara untuk menggabungkan keahlian mereka dalam meningkatkan pemberian layanan, keselamatan pasien dan kualitas perawatan (Barr & Coyle, 2013).

Keterampilan kolaborasi merupakan bagian dari *21st Century Skills* (Keterampilan Abad ke-21). *21st Century Skills* merupakan serangkaian luas kemampuan kognitif dan afektif yang dianggap dapat membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir secara cerdas dan terbuka agar dapat menghadapi tantangan perkembangan teknologi di abad ke-21 (Koenig, 2011). Keterampilan kolaborasi adalah keterampilan dalam bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dengan tetap menghargai satu sama lain. (Greenstein, 2012).

Implementasi IPE mempunyai peran penting dalam mempersiapkan lulusan profesi kesehatan untuk melakukan kerja kolaboratif dalam menyelesaikan masalah kesehatan atau penyakit yang disebabkan oleh bencana. Mahasiswa atau tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi pada pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar masing-masing profesi dan mengembangkan semangat saling menghormati, kepercayaan, dan kerja kolaboratif dalam upaya sinergis untuk dapat mengambil tindakan yang cepat, tepat dan akurat sehingga masalah kesehatan yang dialami korban yang terdampak bencana dapat diatasi secara tuntas (Kusumawati, 2015).

Salah satu keuntungan penerapan IPE dan praktik kolaborasi adalah tercapainya komunikasi yang lebih efektif antar tenaga kesehatan dalam

memberikan pelayanan. Hasil penelitian Gilbert (2010) menyatakan bahwa praktik kolaborasi interprofesi berhubungan dengan berkurangnya angka mortalitas, angka komplikasi, lama rawat di rumah sakit. Hal ini senada dengan fokus kluster kesehatan yaitu menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dalam penanggulangan bencana (Dody, 2014).

Hasil survey terhadap institusi dari 42 negara yang sudah menerapkan IPE menyatakan bahwa IPE memberikan pengaruh positif untuk kolaborasi antar profesi dalam dunia kesehatan. IPE juga dianggap dapat menjadikan asuhan keperawatan lebih berkualitas dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan, hal ini dapat menjadi acuan tidak hanya bagi negara terkait tetapi juga baik bila diterapkan dinegara-negara lain (Gilbert et al., 2010).

Di Indonesia sendiri IPE sudah mulai dikenal melalui HPEQ project (2011). Hal ini terbukti dari keterlibatan Indonesia sebagai partner dalam *Kobe University Interprofessional Education for Collaborating Working Center (KIPEC)*. Namun demikian pengembangan dan penerapan kurikulum IPE di Indonesia masih belum merata di seluruh perguruan tinggi.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia, sudah menjadikan IPE sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran, seperti di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 4-6 mahasiswa dari empat program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY melakukan diskusi bersama setiap akhir pekan (Sundari, 2013). Namun demikian di banyak perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta masih belum menerapkan IPE dalam implementasi kurikulum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulung Devica (2014) didapatkan data 97,21% mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang terdiri dari Program Studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat dan Farmasi memiliki persepsi baik terhadap IPE. Penelitian lain yang dilakukan di Universitas Padjadjaran (Unpad), menjabarkan bahwa IPE diterapkan pada intrakurikulum program studi Ilmu Keperawatan dan belum dilaksanakan penerapan IPE antar program studi. (Hakiman, 2016).

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan IPE di Indonesia masih berfokus pada penerapan praktik kolaborasi di Rumah Sakit, tetapi belum menyentuh pada bidang kebencanaan. Bidang kebencanaan sangat membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, namun penelitian IPE maupun praktik kolaborasi dalam bidang kebencanaan masih belum banyak terpublikasikan. FIKES UPN Veteran Jakarta secara tidak terstruktur sudah melakukan IPE dalam pembekalan sebelum pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana terpadu antar program studi walaupun belum terstruktur di dalam kurikulum. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mendalami, apakah ada hubungan antara IPE dengan kolaborasi mahasiswa dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian berjudul “Hubungan *Interprofessional Education* (IPE) dengan Kolaborasi antar Mahasiswa dalam Simulasi Tanggap Darurat Bencana di FIKES UPN Veteran Jakarta”.

I.2 Rumusan Masalah

Bahwa keberhasilan dalam penanggulangan bencana, terutama mengurangi jumlah korban yang terdampak sangat ditentukan oleh upaya tanggap darurat bencana. Dibutuhkan sinergitas dalam penanggulangan bencana. Keterampilan kolaborasi sangat diperlukan dalam mewujudkan sinergitas demi tercapainya tujuan. Mewujudkan kolaborasi yang efektif antar profesi salah satunya dapat dilakukan dengan diterapkannya praktik kolaborasi sejak dini melalui proses pembelajaran. Kecakapan bekerjasama dengan profesi harus dilatih, IPE dicetuskan sebagai sistem pendidikan yang terintegrasi untuk mempersiapkan praktik kolaborasi. Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta belum menerapkan IPE dalam kurikulum, tetapi sudah mengawali IPE dalam simulasi penanggulangan bencana terpadu meskipun belum terstruktur. Simulasi penanggulangan bencana dilaksanakan setiap tahunnya bagi mahasiswa fakultas ilmu kesehatan tingkat akhir. Berdasarkan latar belakang diatas dan observasi yang dilakukan di UPN Veteran Jakarta, FIKES UPN Veteran Jakarta akan melaksanakan Simulasi tanggap darurat bencana gabungan seluruh Program Studi. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

hubungan *Interprofessional Education* (IPE) dengan kolaborasi antar mahasiswa dalam simulasi tanggap darurat bencana di FIKES UPN Veteran Jakarta.

I.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana gambaran karakteristik responden (usia, jenis kelamin, dan program, studi) mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta?
- b. Bagaimana gambaran kolaborasi antar mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta dalam simulasi tanggap darurat bencana?
- c. Bagaimana gambaran *Interprofessional Education* (IPE) mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta?
- d. Adakah hubungan karakteristik responden dengan kolaborasi antar mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta?
- e. Adakah hubungan IPE dengan kolaborasi antar mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta?

I.4 Tujuan Penelitian

I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan IPE dengan kolaborasi antar mahasiswa FIKES dalam simulasi tanggap darurat bencana di FIKES UPN Veteran Jakarta tahun 2020.

I.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui gambaran karakteristik responden (usia, jenis kelamin, dan program, studi) mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta.
- b. Mengetahui gambaran kolaborasi antar mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta dalam simulasi penanggulangan bencana.
- c. Mengetahui gambaran *Interprofessional Education* IPE mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta.
- d. Mengidentifikasi Karakteristik Responden (Usia, Jenis Kelamin dan Program Studi) dengan kolaborasi antar mahasiswa
- e. Mengidentifikasi hubungan IPE dengan kolaborasi antar mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta

- a. Penerapan IPE diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi bencana mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta secara terpadu antar program studi.
- b. Mahasiswa FIKES UPN Veteran Jakarta dapat menerapkan kolaborasi antar mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari untuk pengurangan resiko bencana.

I.5.2 Bagi Pihak UPN Veteran Jakarta

- a. Bila mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kolaborasi antar mahasiswa, maka resiko terdampak bencana lebih kecil dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan tentang kolaborasi antar mahasiswa.
- b. Dapat dijadikan rekomendasi bagi universitas untuk memasukkan IPE dalam kurikulum pembelajaran.

I.5.3 Bagi Peneliti

- a. Dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama ini di FIKES UPN Veteran Jakarta
- b. Dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pelatihan dalam hal penelitian bidang kesehatan dan bidang kebencanaan.